

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk: a. mengetahui dan menganalisis bagaimanakah Implikasi Hukum Penghibahan Yang Melanggar Bagian Mutlak atau *Legitieme Portie* Ahli Waris Dalam Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia; dan b. mengetahui dan menganalisis Apakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 59/Pdt/2019/PT PAL telah sesuai dengan Hukum Waris KUHPer Indonesia. Metode Penelitian. Tipe penelitian dalam ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian, yaitu, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Hasil penelitian. a. Bahwa jika para ahli waris mutlak atau *legitimaris* mengajukan gugatan, maka prinsipnya bagian mutlak atau *legitieme portie* wajib dipenuhi. Dalam kasus ini, objek sengketa berada pada pihak ketiga, maka pihak ketiga wajib mengembalikan objek hibah kepada *legitiemaris* untuk memenuhi bagian mutlak yang menjadi haknya. Ketentuan ini berlaku meskipun pihak ketiga memperoleh objek hibah melalui transaksi sah b. Dalam putusan tersebut, hibah yang diberikan orang tua kepada salah satu anaknya telah memenuhi syarat-syarat hibah yang disebutkan dalam Pasal 1688 KUHPer, namun, hibah orang tua kepada salah satu anaknya tersebut telah mengurangi bagian mutlak atau *legitieme portie* ahli waris yang lain. Peneliti menemukan bahwa Putusan Hakim dalam perkara nomor 59/Pdt/2019/PT.Pal tidak didasarkan pada Teori Keadilan. Kesimpulan. Hibah yang dilakukan oleh H. Basir Ahmad kepada Ikbal Basir Khan tidak dapat dianggap sah karena melanggar hak para ahli waris yang berhak atas bagian yang lebih besar dari harta warisan tersebut. Penggugat memiliki hak atas $\frac{3}{4}$ bagian dari harta yang telah dihibahkan.

Kata kunci: *Implikasi, Hibah Tanah, Bagian Mutlak, Hukum Waris KUHPer.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to: a. know and analyze how the Legal Implications of Giving in Violation of the Absolute Part or Legitieme Portie of Heirs in the Inheritance Law of the Indonesian Civil Code; and b. know and analyze whether the Judges' Legal Considerations in Decision Number 59/Pdt/2019/PT PAL are in accordance with the Inheritance Law of the Indonesian Civil Code. Research Method. This type of research is normative juridical. The research approach, namely, the Statute approach, the Conceptual Approach and the Case approach. a. That if the absolute heirs or legitimaris file a lawsuit, then in principle the absolute part or legitieme portie must be fulfilled and in this case, in this case the object of dispute is with a third party, then the third party is obliged to return the object of the grant to the legitimaris to fulfill the absolute part that is his right. This provision applies even though the third party obtained the grant object through a legal transaction. b. In the decision, the grant given by the parents to one of their children has fulfilled the conditions of the grant mentioned in Article 1688 of the Civil Code, however, the grant of the parents to one of their children has reduced the absolute share or legitieme portie of the other heirs then the researcher found that the Judge's Decision in case number 59/Pdt/2019/PT.Pal was not based on the Theory of Justice. Conclusion. The grant made by H. Basir Ahmad to Ikbal Basir Khan cannot be considered valid because it violates the rights of the heirs who are entitled to a larger share of the inherited property. The plaintiff has the right to $\frac{3}{4}$ of the property that has been granted.

Keywords: *Implication, Land Grant, Absolute Part, Civil Code Inheritance Law.*